

Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Aditya Fadillah¹, Nurbaiti, M. Kom²

¹Fakultas ekonomi bisnis dan islam, universitas islam negeri sumatera utara

²Fakultas ekonomi bisnis dan islam, universitas islam negeri sumatera utara

Korespondensi Penulis,

Email : Adityafadillah207@gmail.com, Nurbaiti@uinsu.co.id

ABSTRACT

The purpose of conducting this research was to find out how the application of the accounting system to cash receipts and disbursements at the Regional Financial and Asset Management Agency of North Sumatra Province. Accountability (accountability) of government is manifested in LAKIP or Performance Accountability Reports of Government Agencies which are reports that show the form of government financial performance accountability to the public for one fiscal year. Every rupiah of public money that has been given to finance development and the running of the government is accounted for by the government. The research method of this journal is using qualitative research methods. The result of this study is that the implementation of regional asset management has been running in accordance with the regulations that have been made. It's just that there are some lack of data and the number of terms and conditions and status of real estate ownership and databases that are appropriate for preparing regional government balance sheets.

Keywords: Accountability, Organization Structure, Implementation

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi pada penerimaan dan pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pertanggung jawaban Pemerintah (kewajiban lapor) dinyatakan oleh LAKIP, yaitu. laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga negara, yaitu laporan yang memberikan pertanggungjawaban publik atas hasil perekonomian negara dalam satu tahun anggaran. Setiap rupiah dana publik yang diberikan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintah ada di rekening pemerintah. Metode penelitian majalah ini adalah penggunaan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan yang dibuat. yang kurang hanyalah informasi dan jumlah nilai dan keadaan kondisi harta benda, serta database yang sangat cocok untuk penyusunan neraca pemda.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Struktur Organisasi, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang Pemerintahan Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Pengelolaan pemerintahan wilayah yang akuntabel, tak terlepas dari pengelolaan APBD, Pengelolaan pemerintah daerah yang selalu berakuntabilitas tidak pernah tanggal dari aturan pemda, dimana hal tersebut sangat bekerjasama menggunakan fungsi pemda dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Begitu juga menggunakan Komponen krusial dalam membangun akuntabilitas atas lembaga-forum publik artinya menggunakan penyusunan laporan keuangan sektor publik. Pembuatan laporan keuangan yg sempurna merupakan bentuk berasal kebutuhan transparansi yang artinya syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah akibat kegiatan pengelolaan asal daya publik.

Pertanggung jawaban(akuntabilitas) pemerintahan selalu diwujudkan ke dalam Lakip(atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yg mengandung arti sebagai laporan yang menunjukkan bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan pemerintah kepada publik selama kurun waktu satu tahun anggaran.

berasal uraian yang telah disebutkan diatas, penulis merasa tertarik buat membahas lebih lebih jelasnya lagi buat pembuatan jurnal ini

RUMUSAN MASALAH

Rumusan yang telah dibuat untuk dapat melakukan penelitian ini yaitu dapat memahami bagaimana Penerapan pada Sistem Akuntansi pada Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang ada pada Badan Pengelolaann Keuangan dan Aset Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode dari jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Dimana pada metode tersebut saya turun langsung ke Lokasi Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl Imam Bonjol No. 18 Gedung Bank Sumut. Merupakan lokasi sementara karena kantor utama dalam pembangunan. Waktu dalam dilakukannya penelitian ini dimulai dari tanggal 02 Februari 2022 s/d 04 Maret 2022 (1 Bulan).

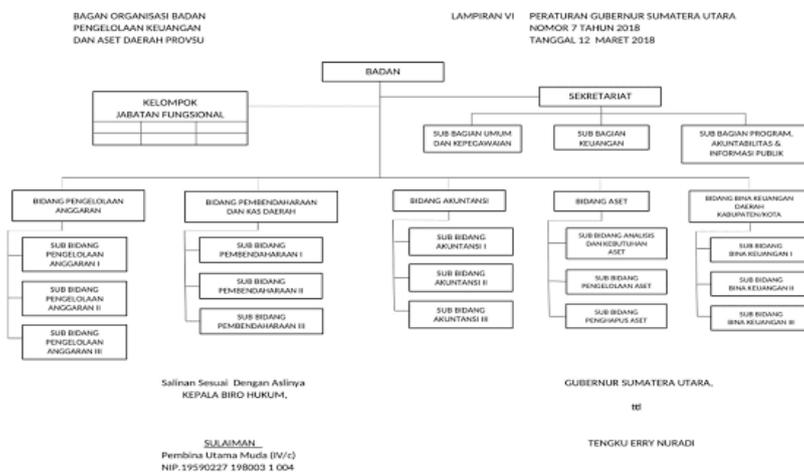
HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas ialah syarat dasar buat mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang terdapat didalam suatu Badan Pemerintaha dan buat untuk memastikan bahwa kekuasaan harus

disalurkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan menggunakan tingkat efisiensi, efektivitas, integritas, dan penilaian tertinggi.

Akuntabilitas yang terjadi pada Bpkad telah memenuhi syarat buat mencegah banyak sekali penyalahgunaan kekuasaan yg ada disalam Badan tadi. Komponen-Komponen terpenting yg ada didalamnya telah menciptakan akuntabilitas yang baik ketika Anda menyiapkan laporan keuangan ke sektor publik. Penyusunan laporan keuangan yang relevan menjadi salah satu bentuk kebutuhan akan transparansi, artinya transparansi pemerintah tentang dampak pengelolaan sumber daya sektor publik merupakan prasyarat akuntabilitas. menggunakan adanya LAKIP menjadi bentuk Laporan Keuangan, maka akuntabilitas yang dapat menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dana masyarakat selama satu tahun peraturan.

Struktur Organisasi di Bpkad wilayah Provsu merupakan Struktur organisasi yg dimana terdapat suatu sistem yg dipergunakan buat mendefinisikan suatu hirarki pada suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, manfaatnya dan ke mana beliau melapor ke dalam organisasi pemerintahan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera, yakni sebagai berikut :



Job description atau deskripsi pekerjaan atau job description adalah pernyataan tertulis yang memuat maksud pengaturan tugas/tugas. Deskripsi ini mencakup gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan tugas, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, mengapa pekerjaan itu dilakukan, posisi eksklusif dan tugas pekerjaan lainnya, dan hubungan eksternal (eksternal) dengan organisasi. tujuan unit kerja dan seluruh perusahaan. perusahaan memiliki beberapa jenis wilayah kerja dengan tugas pokoknya, karena memiliki salah satu kantor

pengelola keuangan dan keuangan daerah di Sumatera Utara maka memiliki beberapa tugas pokok yang masing-masing sesuai dengan jabatannya.

Pengelolaan yang ada di Badan aset provsu ini melalui Seluk-beluk planning properti teritorial dan perlu menghubungkan perolehan barang dagangan yang lalu melibatkan keadaan waktu ini menjadi alasan buat membentuk langkah pada masa depan. Dana Perimbangan yg mencakup Dana Alokasi awam (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer nasional pemerintah daerah yang bertujuan untuk membiayai tambahan pengeluaran daerah. jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah maka terjadi defisit. Dengan hal tersebut negara mentransfer dana ke daerah sebagai dana perimbangan untuk menutup defisit belanja daerah. Selain itu, dalam rangka mendukung pembangunan daerah, kewajiban negara terhadap daerah masih sangat dibutuhkan, oleh karena itu diperlukan Dana Perimbangan untuk percepatan pembangunan daerah. Belanja modal mempengaruhi efisiensi keuangan pemerintah daerah dan dikatakan bahwa belanja modal yang tinggi mencerminkan dari mana sebagian besar infrastruktur dan kendaraan yang dibangun berasal. Semakin banyak pengembangan yang dilakukan, maka secara wajar meningkatkan aktivitas ekonomi pemerintah, semakin banyak sumber yang diproduksi, semakin banyak yang didapat.

PENUTUP

Kesimpulan

Bpkad Provinsi Sumatera Utara sudah sinkron dalam memakai siklus yang sudah ditetapkan serta sudah sesuai menggunakan aturan-hukum yang berlaku bagi Provinsi Sumatera Utara yakni Peraturan Pemerintah dalam Negeri angka 199 Tahun 2016 dimana pada semua aturan dan proses telah bisa terlaksanakan secara baik serta benar. tetapi, pada penggunaan barang yang dipelaksananya masih terdapat tidak sinkron dengan hukum yg belaku. dengan contoh penggunaan tunggangan dinas yg masih digunakan diluar jam operasional.

Saran

untuk peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bisa menyampaikan surat keterangan serta acuan buat penelitian-penelitian berikutnya yang akan peneliti lakukan seerta dapat menambah wawasan saudara/saudari tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah dan Penerapan Sistem Akuntansi yang ada pada BPKAD Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Entrepreneur, Mengenal Struktur Organisasi, Fungsi, Jenis dan Faktor yang Mempengaruhinya.

Yogi Hertanto, Tjahjanulin Domai, Fadillah Amin.(2017). Penerapan Sistem info Manajemen daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset wilayah di Kabupaten Blitar).

Selly Septiani, Endah Kusumastuti, (2019), Penerapan Transaksi Non Tunai dalam aplikasi Belanja pemda buat Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi kasus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi serta bisnis [JIMEIS]. Vol 2 nomor dua Februari 2022, hal : 1-11

Nining Asniar Ridzal, 2020. Impak Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan serta Aset wilayah (BPKAD) Kabupaten Buton.

BPKAD PROVSU <http://bpkad.sumutprov.go.id> (diakses pada Maret 14, 2022)

Dini N.Rezeki, 12 Jul 2022. (Akuntabilitas merupakan Kunci: Prinsip serta contoh Akuntabilitas)